

Strategi Kebijakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Neli Gusti Ade

Universitas Riau

*neligustiade@gmail.com

Abstrak Pembangunan berkelanjutan memerlukan strategi kebijakan dan peran serta masyarakat yang efektif dalam tata kelola lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis Data dan informasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor interaksi, dan faktor lainnya. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Dampak strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga bervariasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang, dan terukur maupun tidak terukur. Ketercapaian sasaran strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Kata kunci: strategi kebijakan; peran serta masyarakat; tata kelola lingkungan; pembangunan berkelanjutan

Abstract Sustainable development requires policy strategies and effective community participation in environmental governance. This research uses sociological methods. Data and information are then analyzed using content analysis techniques. The research results show that the factors that influence policy strategies and community participation in environmental governance to support sustainable development in Indonesia can be divided into four groups, namely internal factors, external factors, interaction factors, and other factors. These factors have varying influences on policy strategies and community participation in environmental governance, both positively and negatively. The impact of policy strategies and community participation in environmental governance to support sustainable development in Indonesia also varies, both directly and indirectly, short term and long term, and measurable or unmeasurable. The achievement of policy strategy targets and community participation in environmental governance to support sustainable development in Indonesia can be measured using indicators that cover social, economic and environmental aspects. This research provides recommendations for the government, community and other stakeholders to improve policy strategies and community participation in environmental governance to support sustainable development in Indonesia.

Keywords: policy strategy; community participation; environmental governance; sustainable development

To cite this article: Ade, N, G. 2023. Strategi Kebijakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Online. Unri Conference Series: Community Engagement 5*: 493-483. <https://doi.org/10.31258/unricsce.5.493-483>

© 2023 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2023

PENDAHULUAN

Jumlah Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik sebagai pihak yang terkena dampak maupun sebagai pihak yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kondisi di mana fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup terganggu akibat ulah manusia atau bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa dampak buruk dari kerusakan lingkungan hidup antara lain adalah:

- a. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga mutu lingkungan hidup turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di udara, air, tanah, atau suara. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai penyakit, gangguan kesehatan, kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan ekosistem.
- b. Banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai atau genangan air yang menggenangi permukaan tanah yang kering akibat curah hujan yang tinggi, luapan air laut, atau tersumbatnya saluran air. Banjir dapat menyebabkan kerugian materil, korban jiwa, penyakit, kelaparan, dan pengungsian. Banjir sering terjadi akibat pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan liar, penggundulan lahan, atau perubahan tata guna lahan.
- c. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan akibat faktor alam atau ulah manusia. Kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat hewan liar, mengurangi fungsi hutan sebagai penyerap karbon dioksida dan produsen oksigen, serta menimbulkan asap yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan pernafasan.
- d. *Global warming*. *Global warming* adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyerap radiasi matahari dan memantulkannya kembali ke bumi. *Global warming* dapat menyebabkan perubahan iklim, pencairan es kutub, kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, badai, kepunahan spesies, dan gangguan pertanian.
- e. Tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang turun dari lereng bukit atau gunung akibat gaya gravitasi yang melebihi gaya gesek tanah. Tanah longsor dapat dipicu oleh faktor alam seperti gempa bumi, hujan lebat, erosi tanah, atau faktor manusia seperti penebangan hutan, penambangan, atau pembangunan di daerah rawan longsor. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, korban jiwa, dan isolasi wilayah.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi Kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Strategi kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, mencegah dan mengatasi pencemaran, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi Kebijakan dalam tata kelola lingkungan harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan.

Peran serta masyarakat adalah keterlibatan aktif dan sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan lingkungan. Peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan penting untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan juga dapat meningkatkan legitimasi, kredibilitas, dan akseptabilitas kebijakan atau program yang dijalankan.

Dengan demikian, strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Strategi kebijakan memberikan arah dan kerangka kerja bagi tata kelola lingkungan, sedangkan peran serta masyarakat memberikan dukungan dan kontribusi bagi tata kelola lingkungan. Keduanya harus dilakukan secara sinergis dan harmonis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan sejahtera bagi generasi sekarang dan mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menyangkut: (1) Bagaimana konsep dan teori strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan (3) Apa saja dampak dan ketercapaian sasaran dari strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan.

Tujuan dari pengabdian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimanakah konsep dan teori kebijakan dalam tata kelola lingkungan, (2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan (3). Untuk mengetahui apa saja dampak dan ketercapaian sasaran dari strategi kebijakan dalam tata kelola lingkungan.

METODE PENERAPAN

Metode penerapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pengabdian sosiologis dengan meliputi beberapa aspek. Adapun aspek yang akan dijelaskan dalam metode penerapan kegiatan meliputi langkah kegiatan untuk mencapai tujuan, teknik penyelesaian masalah, alat ukur ketercapaian, dan analisis data.

A. Langkah-Langkah Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan hal ini dilakukan juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan.
2. Melakukan edukasi berupa tanya jawab dan diskusi atau pendampingan kepada masyarakat mengenai tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat mendukung dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Memberikan media informasi lembar balik tentang tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Langkah kegiatan diatas secara umum telah diterapkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, perlu dilakukan edukasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat serta memberikan modul panduan agar memudahkan masyarakat untuk me-review kembali materi yang sudah didapatkan tentang tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Teknik penyelesaian masalah

Berdasarkan langkah kegiatan di atas, maka teknik/strategi penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) pengumpulan data dalam bentuk survei data sekunder dan wawancara, 2) Memfasilitasi setiap kegiatan, dan 3) mengevaluasi keberhasilan intervensi.

C. Alat ukur ketercapaian

Evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat.
2. Peningkatan keterampilan atau skill masyarakat dalam memahami strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Tersedianya media dan terdistribusinya pesan-pesan terkait hipertensi dalam bentuk buku panduan dan lembar balik.

4. Tersedianya alat yang dapat mendukung berlangsungnya strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Untuk mengevaluasi keberhasilan indikator tersebut, digunakan instrument yaitu berupa kuesioner pre dan post kegiatan, lembar observasi, serta video/camera.

D. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni memaparkan hasil dari ketercapaian kegiatan yang telah dilakukan yang akan disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

A. Konsep dan Teori Tentang Strategi Kebijakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Konsep strategi kebijakan yang mana rencana aksi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi kebijakan harus mencakup aspek perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pemulihan ekosistem. Strategi kebijakan juga harus sesuai dengan tujuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. (Chaizienul Ulum et al., 2017).

Peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang mana keterlibatan aktif masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggung jawab di dalamnya. Peran serta masyarakat dapat berupa hak mengakses informasi, hak memberikan masukan, hak mengawasi, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Peran serta masyarakat juga dapat berupa partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, seperti melakukan penghematan energi, pengurangan sampah, penanaman pohon, dan lain-lain.

Sementara itu konsep tata kelola lingkungan adalah cara di mana sumber daya alam dan lingkungan dikelola, dikendalikan, dan diawasi secara berkelanjutan. Tata kelola lingkungan melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, maupun akademisi. Tata kelola lingkungan juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan dan Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dan harmonis. Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek intergenerasi dan intragenerasi, yaitu adanya rasa tanggung jawab terhadap generasi sekarang dan generasi mendatang.

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain adalah:

1. Teori Kebijakan Publik: Teori ini menjelaskan tentang proses pembuatan keputusan publik yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Teori ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, seperti masalah publik, agenda publik, alternatif publik, legitimasi publik, implementasi publik, evaluasi publik, dan perubahan publik.
2. Teori Partisipasi Publik: Teori ini menjelaskan tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan publik. Teori ini juga menjelaskan tentang manfaat dan tantangan partisipasi publik, serta model-model partisipasi publik yang dapat diterapkan dalam konteks tertentu.
3. Teori Tata Kelola: Teori ini menjelaskan tentang cara pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama. Teori ini juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan.
4. Teori Pembangunan Berkelanjutan: Teori ini menjelaskan tentang konsep dan prinsip pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Teori ini juga menjelaskan tentang indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tata kelola lingkungan adalah proses pengaturan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup oleh berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dengan menggunakan instrumen hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tata kelola lingkungan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipatif, konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif, efisien, inklusif, dan berkeadilan. Tata kelola lingkungan yang baik dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, serta mencegah dan mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti bakti sosial, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, pengembangan produk, alih teknologi, dan lain-lain.

Pengabdian kepada masyarakat memiliki kaitan erat dengan konsep dan teori tentang strategi kebijakan, peran serta masyarakat, dan tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa kaitannya adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi salah satu strategi kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan cara mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.
2. Pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan, dengan cara memberikan edukasi, fasilitasi, advokasi, dan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih peduli, berpartisipasi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
3. Pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai kualitas tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dengan cara mengukur dampak, manfaat, dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Kebijakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan hidup.

Kondisi Lingkungan hidup yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang baik dan sehat, sesuai dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah, seperti kerusakan hutan, pencemaran udara, air, dan tanah, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan bencana alam. Masalah-masalah ini berdampak negatif terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat, terutama yang hidup di daerah-daerah rentan dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama berupaya untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi.

2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. Masyarakat sebagai penerima manfaat atau dampak dari kebijakan publik harus memiliki hak untuk ikut berperan serta dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, sosial media, dengar pendapat, konsultasi publik, advokasi, atau aksi sosial². Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi kebijakan publik, serta mengurangi potensi konflik dan ketimpangan.

3. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah

Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah harus bersikap terbuka dalam memberikan informasi, menjalin komunikasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan hidup. Pemerintah

juga harus bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari kebijakan publik yang diambilnya, serta bersedia menerima saran, kritik, atau pengaduan dari masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan, kerjasama, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

4. Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan

Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam tata kelola lingkungan, seperti pemerintah, swasta, akademisi, LSM, media, dan masyarakat. Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika masalah lingkungan hidup. Dengan kerjasama dan koordinasi, berbagai pemangku kepentingan dapat saling berbagi informasi, sumber daya, ide, pengalaman, dan tanggung jawab dalam mencari solusi yang optimal untuk masalah lingkungan hidup. Kerjasama dan koordinasi juga dapat meminimalkan konflik antar sektor atau antar daerah yang sering terjadi akibat tumpang tindih kewenangan atau kepentingan.

5. Inovasi dan kreativitas dalam penyediaan layanan publik

Inovasi dan kreativitas dalam penyediaan layanan publik yang responsif, efektif, efisien, dan inklusif terhadap isu-isu lingkungan hidup yang dinamis dan kompleks. Inovasi dan kreativitas dalam penyediaan layanan publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Dengan inovasi dan kreativitas, pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebutuhan, dan harapan.

Selain faktor-faktor di atas yang mempengaruhi strategi kebijakan dan peran serta masyarakat, serta memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada. Inovasi dan kreativitas dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, penganggaran, regulasi, teknologi, partisipasi, atau kolaborasi.

Selain faktor-faktor di atas yang mempengaruhi strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu Faktor politik, Faktor ini berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh berbagai aktor politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan lingkungan. Faktor politik juga berkaitan dengan stabilitas dan demokratisasi sistem politik yang mempengaruhi ruang gerak dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Faktor politik dapat menjadi konstruktif atau destruktif dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan.

Faktor ekonomi, faktor ini berkaitan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat, serta tingkat konsumsi dan produksi sumber daya alam. Faktor ekonomi juga berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung kebijakan dan program lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi progresif atau regresif dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan.

Faktor sosial-budaya, faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Faktor sosial-budaya juga berkaitan dengan keragaman dan kesetaraan gender, etnis, agama, dan golongan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Faktor sosial-budaya dapat menjadi harmonis atau kontradiktif dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan.

Faktor teknologi, faktor ini berkaitan dengan kemajuan dan inovasi teknologi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Faktor teknologi juga berkaitan dengan aksesibilitas dan keterjangkauan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung partisipasi mereka dalam tata kelola lingkungan. Faktor teknologi dapat menjadi solutif atau polutif dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan.

Beberapa yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga lain
2. Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara-cara praktis dan efektif untuk mengelola lingkungan hidup, seperti pengolahan sampah, penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan lain-lain

3. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti pembuatan komposter, pembangunan biogas, penanaman pohon, pengembangan ekowisata, dan lain-lain
4. Melakukan penelitian dan pengembangan produk atau teknologi yang ramah lingkungan, serta melakukan alih teknologi kepada masyarakat, seperti pembuatan pupuk organik, pembuatan sabun dari minyak jelantah, pembuatan lampu tenaga surya, pembuatan alat pengukur kualitas udara, dan lain-lain
5. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, dalam menginisiasi, mendukung, dan mengawasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

C. Dampak dan Ketercapaian Sasaran Strategi Kebijakan dan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Dampak strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Dampak ini berkaitan dengan konsekuensi dan implikasi dari penerapan strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau tidak langsung, jangka pendek atau jangka panjang, dan terukur atau tidak terukur.

Dampak positif dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain adalah: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah, meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan lingkungan, dan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.

Dampak negatif dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain adalah menimbulkan konflik dan ketegangan antara berbagai kepentingan, menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial, menimbulkan resistensi dan penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, menimbulkan masalah baru yang belum terantisipasi, dan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

Ketercapaian sasaran strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia Ketercapaian ini berkaitan dengan tingkat pencapaian atau realisasi dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketercapaian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan, valid, reliabel, dan akurat.

Ketercapaian sasaran strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan adalah: indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemiskinan multidimensi (IPM), indeks demokrasi (IDI), indeks partisipasi publik (IPP), indeks inovasi global (GII), indeks tanggung jawab sosial korporasi (CSR), indeks kesadaran lingkungan (IKL), dan lain-lain.

Untuk mengukur dampak lingkungan dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan adalah dengan menggunakan metode analisis dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL meliputi analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta rancangan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. AMDAL harus melibatkan peran serta masyarakat dalam prosesnya, baik dalam penyusunan, penilaian, maupun pengawasan. AMDAL dapat digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan dengan cara: menilai potensi dampak positif dan negatif dari suatu usaha atau kegiatan terhadap aspek-aspek lingkungan hidup, seperti kualitas udara, air, tanah, flora, fauna, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan, menentukan alternatif usaha atau kegiatan yang paling ramah lingkungan, menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi dampak negatif; dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala.

Cara lain mengukur dampak lingkungan dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan adalah dengan menggunakan metode indikator pembangunan berkelanjutan (IPB). IPB adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. IPB dapat digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan dengan cara, mengidentifikasi isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, regional, atau lokal, menetapkan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan isu-isu tersebut, memilih indikator-indikator yang relevan, valid, reliabel, dan akurat untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran tersebut, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menghitung nilai indikator-indikator tersebut; dan menganalisis dan menyajikan hasil pengukuran indikator-indikator tersebut secara sistematis dan komunikatif. (Syamsuri, A. et al., 2022)

Tabel 1. Parameter pemasaran telur asin bawang secara langsung dan media digital

Metode pemasaran	Alat media	Waktu penjualan minggu ke-			Jumlah total
		I	II	III	
Non Digital (lansung kemasyarakat)	Barner	2 telur	4 telur	20 telur	26
Media digital	Poster digital	8 telur	6 telur	2 telur	16
Jumlah Total					42

Tabel 2. Parameter pemasaran telur asin bawang Asap secara langsung dan media digital

Metode pemasaran	Alat media	Waktu penjualan minggu ke-			Jumlah total
		I	II	III	
Non Digital (lansung kemasyarakat)	Barner	20 telur	12 telur	0 telur	36
Media digital	Poster digital	8 telur	0 telur	0 telur	8
Jumlah Total					42

Pada Tabel 1 dan Gambar 3 menunjukkan penjualan dengan melalui media digital dapat meningkatkan penjualan telur asin bawang biasa. Peminatan masyarakat selama dilakukan dalam waktu 3 minggu tidak bisa mencapai target penjualan, apabila hanya dijual secara langsung. Telur asin bawang yang semula berjumlah 60 butir telur, hanya terjual 26 butir telur terjual dalam waktu 3 minggu. Penjualan tidak melebihi dari 70 %. Penjualan yang dilakukan dalam pemasaran ini hanya menjual satu produk yaitu telur asin bawang saja di area keramaian, seperti area *Car Free Day*, Stadion

Olah Raga dan tempat-tempat wisata keluarga. Dengan pemasaran melalui webside digital Instagram dapat mencapai target hasil penjualan telur asin bawang yaitu di atas dari 70 %.

Pada Tabel 2, Gambar 4 dan 5, menunjukkan penjualan telur asin bawang asap lebih terjual dipasarkan langsung di pasaran, seperti di tempat keramaian *Car Free Day* atau tempat wisata,dll. Produk telur asin bawang asap di area keramaian *Car free Day* yang dijual bersama dengan produk lain, seperti produk minuman dingin lemonade dan buah matoa, Hasil penjualan lebih tinggi di minggu pertama dibandingkan jika hanya dijual satu produk telur asin saja. Telur asin bawang asap yang diproduksi sebanyak 46 butir, terjual dalam waktu 2 minggu sudah melebihi dari 70 %, karena sisa telur tidak terjual hanya 4 buah. Tehnik pemasaran ini juga memberikan harga promo dan pengujian rasa telur untuk konsumen yang belum pernah makan telur asin bawang asap. Tehnik penjualan lebih dari 1 produk jualan merupakan suatu strategi pemasaran produk makanan untuk menarik minat konsumen untuk tertarik pada produk makanan yang tidak pernah mereka makan. Konsumen dibolehkan mencoba rasa telur asin bawang asap, supaya konsumen lebih yakin dengan kualitas produk makanan yang ditawarkan dan akhirnya tertarik untuk membeli produk. Hasil yang diperoleh dari konsumen yang mencoba uji rasa telur asin bawang asap, adalah kenyataannya kebanyakan konsumen tersebut berpendapat bahwa telur asin bawang asap memiliki rasa yang lebih enak dari telur asin bawang biasa. Pada barner iklan produk diiklankan tentang manfaat telur asin bawang asap pada kesehatan tubuh, misalnya dicantumkan informasi tentang telur asin bawang asap mengandung kolesterol baik. Cara pengiklanan ini lebih membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli, selain uji coba rasa.

Masyarakat yang telah mengenal rasa dari telur asin asap akan langsung membeli, tetapi yang tidak mengenal akan mencoba dan langsung membeli setelah merasakan rasa dan tektur telur asin bawang asap lebih enak dari telur asin asap biasa. Strategi pemasaran penjualan telur asin bawang asap yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zulfiandri *et al.* (2013), bahwa dengan memetakan kebutuhan konsumen di tahap awal pengembangan produk akan menerjemahkan kebutuhan konsumennya ke dalam aspek teknis melalui tahapan-tahapan *product desain*. Tahapan *product desain* menggunakan program *functional need analysis* dan *technical functional analysis*. Dengan kedua analisis ini telah cepat dapat meningkatkan hasil penjualan telur asin bawang asap, karena konsumen merasa dengan menggunakan produk ini tidak akan membahayakan bagi tubuhnya dan cita rasa yang enak juga lebih meningkatkan kertertarikan konsumen untuk membelinya. *Functional need analysis* pada produk makanan sebagian besar dengan memperkaya rasa makanan dengan menambah produk tersebut dengan zat-zat tertentu (mis. vitamin, pengurangan kadar lemak,dsb) atau aroma rasa (rasa jeruk, rasa green tea, dsb) yang akan berefek pada kesehatan. Pada telur asin bawang asap memiliki aroma asap dan pengasapan dengan batok kelapa yang merubah kolesterol jahat menjadi kolesterol baik, Asap batok kelapa dari hasil penelitian mengandung senyawa antioksidan yang tentunya lebih menyehatkan daripada yang tidak diasapi. Hal tersebut di atas merupakan tren sosial dalam mendukung fungsional pangan di masyarakat yang bisa meningkatkan penjualan suatu produk (Siro *et al.* 2008).

Hal ini serupa terjadi pada pemasaran produk telur asin asap dari industri rumah tangga Kawasan Rumah Tangga Lestari Sri Rejeki Banjarmasin. Pemasaran produk telur asin asapnya telah meningkatkan pendapatan UKMnya. Pemasaran produknya menggunakan strategi pemasaran dengan Bauran pemasaran atau Marketing Mix 4P, yaitu produk (Product), harga (Price), tempat (Placee), dan promosi (Promotion). Strategi ini menekankan pada kualitas produk, menawarkan beberapa sistem pilihan pembayaran, menentukan lokasi pemasaran yang strategis, dan melakukan beberapa bentuk promosi untuk penjualan produk (Yulianti *et al.* 2022).

KESIMPULAN

Strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan adalah dua hal yang saling terkait

dan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Strategi kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses dan tahapan pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor interaksi, dan faktor lainnya. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, seperti tingkat kesadaran, pengetahuan, keterampilan, motivasi, kepercayaan, dan keterbukaan terhadap isu-isu lingkungan, serta kemampuan dan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola lingkungan. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi dan situasi di luar masyarakat itu sendiri, seperti kebijakan pemerintah, regulasi hukum, dukungan lembaga, sumber daya alam, perubahan iklim, globalisasi, dan lain-lain, yang dapat memberikan peluang atau tantangan bagi masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Faktor interaksi berkaitan dengan hubungan dan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media massa, dan lain-lain, serta mekanisme dan institusi yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi tata kelola lingkungan. Faktor lainnya berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebelumnya, tetapi juga berpengaruh terhadap strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, seperti aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi.

Dampak strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah konsekuensi dan implikasi dari penerapan strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif, langsung atau tidak langsung, jangka pendek atau jangka panjang, dan terukur atau tidak terukur. Ketercapaian sasaran strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah tingkat pencapaian atau realisasi dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi kebijakan dan peran serta masyarakat dalam tata kelola lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketercapaian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan, *valid*, *reliabel*, dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM UNRI yang telah memberi bantuan dana, dan ucapan terimakasih kepada mahasiswa Kukerta yang telah membantu dalam praktek lapangan bersama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, S. H., & Hum, M. (2004). Peran serta masyarakat dalam pembuatan amdal. *Jurisprudence*.
- Chaizienul Ulum, Rispa Ngindana, 2017, *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, Tim UB Press, Malang.
- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 6(1).
- Kahfi, Ashabul. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2.2* (2015).
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015).

- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*.
- Lalu Sabardi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Mina, R. 2016, Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, Jakarta.
- Ode, S., Firman, F., Syahrudin, F., & Regif, S. Y. (2022). Implementasi Portal Jakarta Open Data Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3).
- Rizki, A., & Widiyanto, A. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Kedung Pengaron Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak). *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2).
- Syamsuri, A. R., & Permadi, N. (2022). Penyuluhan Peranan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, hal.9-18.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1)